

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Dalam KBBI kata implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan.²⁰ Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.²¹ Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.²²

Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Selanjutnya Freeman dan Sherwood mengembangkan tahapan proses pembuatan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.²³

²⁰ www.kkbi.id/implementasi (Diakses pada tanggal 3 juli 2019)

²¹Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), hal 16

²²Edi Suharto, *“Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial”*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

²³Ibid. hal 78

Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan). Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.²⁴

Hal serupa juga dijelaskan oleh Pressman Dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).²⁵

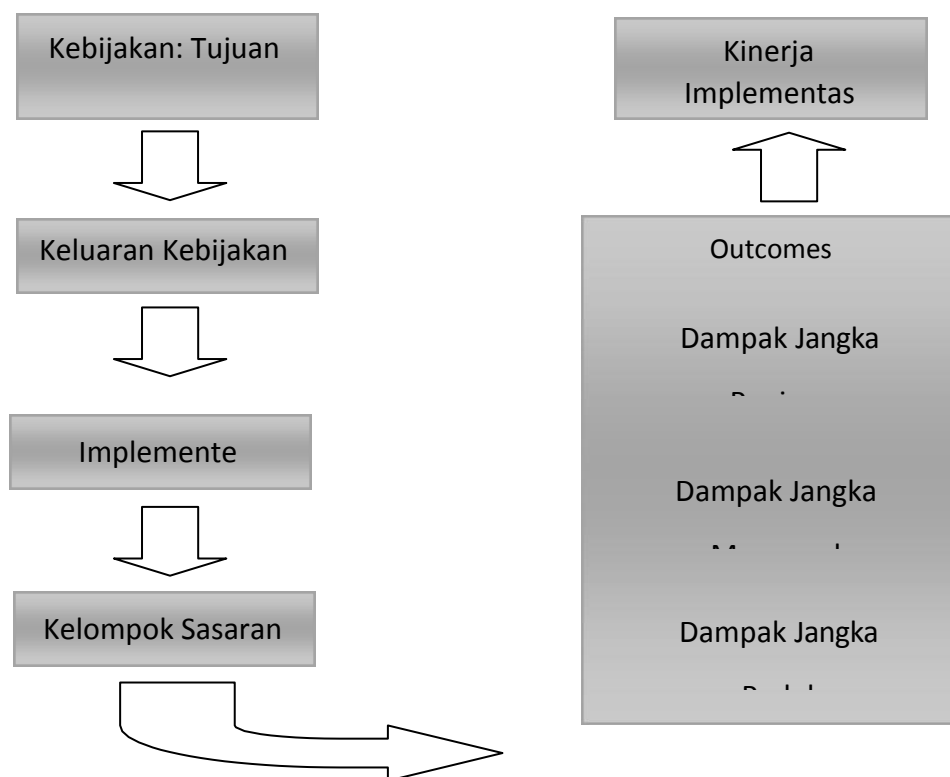
Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka

²⁴Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public", (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 88.

²⁵Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia", (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal 20.

pangang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.²⁶ Proses implementasi dimulai dengan disahkannya suatu kebijakan. Brikut bagan proses implementasi suatu kebijakan.²⁷

Bagan. 2.1 Proses Implementasi²⁸



Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas implementasi merupakan salah satu bagian dari proses atau tahapan dalam perumusan atau rangkaian pembuatan yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran. Sedangkan tujuannya adalah untuk

²⁶ *Ibid* hal 21.

²⁷ *Ibid* hal 21.

²⁸ Sumber: Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia", (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal 72

mendistribusikan atau menjalankan kegiatan dari kebijakan atau program yang telah dikeluarkan dalam rangka mencapai hasil dan tujuan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam tujuan kebijakan atau program tersebut.

2. Tahapan Implementasi

Tujuan kebijakan akan dapat terwujud dengan baik apabila implementasi kebijakan dan perumusan atau pembuatan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dalam suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan suatu tahapan-tahapan dalam proses implementasi agar tujuan dari suatu kebijakan tersebut dapat terwujud. Joko Widodo dalam bukunya yang mengutip dari Darwin menyebutkan bahwa hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam proses implementasi yaitu: pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.²⁹

Joko Widodo menjabarkan lebih operasional mengenai implementasi suatu program atau kebijakan publik, mencakup tiga hal, yaitu:³⁰

1. Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional (kebijakan umum/kebijakan strategi kebijakan manajerial

²⁹ Joko Widodo, *"Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public"*, (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 89

³⁰ Ibid, hal 90-94

(kebijakan teknis operasional). Dalam tahap ini juga ada kegiatan mengkomunikasikan (sosialisasi) kepada masyarakat (*stakeholder*) agar dapat mengetahui arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan.

2. Tahapan pengorganisasian

Pada tahapan ini proses kegiatan mengarah pada:

a) Pelaksana Kebijakan

Tahapan ini menentukan pihak-pihak mana saja yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Yang menjadi pelaksana antara lain: (1) Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) dilingkungan pemerintah daerah. (2) Sektor swasta (*private sector*). (3) Lembaga swadaya masyarakat (LSM). (4) Komponen masyarakat. Selain menentukan pelaksana juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b) Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure “SOP”)

SOP perlu dibuat dalam melaksanakan kebijakan supaya menjadi pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi pelaku kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut

c) Sumber Daya Keuangan Dan Peralatan, Sumberdaya keuangan

berupa penetapan anggaran yang mencakup: besar anggaran yang

- diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana pertanggung jawabannya, dan penetapan sarana prasarana yang mencakup: peralatan apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
- d) Penetapan Menejemen Pelaksana Kebijakan, Penetapan menejemen pelaksanaan lebih menetapkan pada pola kepemimpinan dan kordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan lebih dari satu lembaga maka harus jelas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah itu memakai pola kepemimpinan kolegia atau satu lembaga ditunjuk sebagai kordinator.
 - e) Penetapan Jadwal Kegiatan, Penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan kebijakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan sumber untuk menilai kinerja pelaksana kebijakan yang dilihat melalui dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

3. Tahapan Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan interpretasi dan pengorganisasian. Tahapan-tahapan dalam implementasi dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan yaitu: membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur dan seterusnya agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

B. Tinjauan Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Definisi *Corporate Social Responsibility*

Beberapa definisi tentang CSR yaitu: The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) merupakan lembaga internasional yang berdiri pada tahun 1955 dan memiliki anggota 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, mendefinisikan *corporate social responsibility* komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.³¹

Edi Suharto mendefinisikan CSR agar mudah dipahami dan dapat dilakukan untuk operasional audit adalah dengan mengembangkan konsep *Tripel Bottom Line* dengan menambahkan satu *line* tambahan yaitu *procedure*. Yang dengan demikian, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.³²

ISO (*International Organization for Standardization*) merupakan lembaga internasional yang membuat standarisasi dan panduan khusus yang di peruntukan untuk menjalankan CSR, dalam membuat standarisasi

dan

³¹ Nor Hadi, "*Corporate Social Responsibility*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 47

³² Edi Suharto, "*Pekerja Sosial Di Industri Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*", (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 105

panduan CSR ini ISO berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*). Panduan dan standarisasi ini diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard On Social Responsibility*. ISO 26000 mengartikan tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan atau kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh³³.

Harvard Kennedy School mengeluarkan definisi yang kredibel dan lengkap yang melihat CSR sebagai suatu strategi, jadi CSR tidak hanya meliputi apa yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan keuntungan saja, namun juga bagaimana keuntungan tersebut dihasilkan yang lebih dari sekadar kedermawanan dan kepatuhan. Pada saat yang bersamaan, CSR dipandang sebagai suatu cara untuk membantu perusahaan mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, beserta hubungan organisasi atau perusahaan dengan lingkungan kerja, pasar, *supply chain*, komunitas, dan domain kebijakan publik.

Semangat CSR seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli dan

³³Joko Prastowo Dan Miftachul Huda, "*Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*", (Yogyakarta: Samudra Biru 2011), hal 101

organisasi diatas menggambarkan semangat untuk saling menghargai dan saling berbagi. Seperti halnya dalam ajaran agama islam mengajak untuk saling berbagi. Hal tersebut sesuai dalam surat Al-Baqoroh ayat 277 yang artinya³⁴: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Dari penjelasan tentang definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggungjawab sosial merupakan komitmen yang diambil oleh perusahaan untuk menciptakan kepedulian sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. CSR merupakan perilaku yang etis terhadap stakeholdernya yang terdiri dari internal perusahaan (pemilik perusahaan, karyawan, keluarga karyawan) dan eksternal perusahaan (masyarakat sekitar perusahaan, pemerintah setempat).

2. Tujuan CSR

Dalam menjalankan CSR ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, diantaranya adalah:³⁵

- a) Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan
- b) Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan

³⁴ Depag RI. AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Jumanatul Ali, 2005)

³⁵ Busyra Azheri, "Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory", (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) hal 50

yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen di negara tempat perusahaan melakukan kegiatan produksi

- c) Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal. Termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan.
- d) Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan perusahaan.
- e) Mencegah diri perusahaan untuk tidak mencari atau menerima pebebasan diluar dari yang diberikan secara hukum terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perberuhan, perpajakan, intensif finansial dan isu-isu lainnya.
- f) Mendorong dan mengimplementasikan *Good Coporate Governmance* (GCG) serta mempraktikkan tata kelola perusahaan yang sehat.
- g) Mengembangkan dan mengimplementasikan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri perusahaan sendiri (*self- determination*) secara mandiri untuk menumbuhkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi.
- h) Memperluas mitra bisnis, termasuk para pemasok dan sub kontraktor, untuk mengimplementasikan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
- i) Mendorong kesadaran pekerja perusahaan yang sejalan dengan kebijakan

perusahaan tersebut melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melakukan program-program pelatihan kepada para pekerja.

3. Pentingnya CSR Diterapkan

Salah satu yang mendasari pelaksanaan CSR adalah keberlanjutan perusahaan dalam melakukan aktifitasnya agar tidak terdapat konflik baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Suharto lahirnya CSR dipengaruhi oleh fenomena DEAF di dunia industri, yang mana DEAF merupakan akronim dari:³⁶

a) Dehumanisasi Industri

Efisiensi dan mekanisasi yang semakin kuat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan bagi buruh (PHK dan pengurangan) maupun bagi masyarakat disekitar perusahaan.

b) Emansipasi Hak-Hak Publik

Kesadaran masyarakat yang semakin menguungat akan haknya meminta perusahaan bertanggung jawabnya atas permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut kepedulian perusahaan atas proses produksi dan masalah sosial yang ditimbulkannya

c) Aquariumisasi Dunia Industri

Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka bagaikan aquarium.

³⁶ Edi Suharto, "Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)", (Bandung, Alfabeta, 2009), hal 105-106

Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropi tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

d) Feminisasi Dunia Kerja

Semakina banyaknya wanita yang bekerja, menuntut penyesuaian perusahaan terhadap lingkungan internal dan external organisasi.

Hal-hal lain yang juga penting kenapa perusahaan harus melakukan kegiatan CSR, yaitu:³⁷

1. Semakin meningkatnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia.
2. Adanya posisi negara (dalam hal ini pemerintah yang tugasnya menjaga dan mensejahterakan masyarakat) yang semakin berjarak dengan masyarakat.
3. Semakin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik.
4. Semakin gemanya arti kesinambungan dalam perusahaan.

4. Model Program CSR

Munurut Saidi dan Abidin yang dikutip dalam oleh Edi Suharto menjelaskan ada empat model atau pola CSR yang umumnya dilakukan di Indonesia:³⁸

³⁷Tuti Azra, *"Implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) Di Indonesia"*,

(Padang, Polibisnis, 2012) hal 4

³⁸Edi Suharto, *"Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)"*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hal 110

1. Keterlibatan Langsung, dalam model ini perusahaan menjalankan program-program CSR secara langsung, semisal perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sosial baik dilakukan langsung oleh perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga. Biasanya yang menjalankan tugas ini adalah pejabat senior dalam bidang CSR seperti *corporate secretary, public affair manager*.
 2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah naungan perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang diterapkan di perusahaan negara maju. dalam hal ini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai wujud CSRnya adalah Yayasan Dharma Bhakti Astra, yayasan Sahabat Aqua.
 3. Bermitra Dengan Pihak Lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kemitraan atau kerjasama dengan lembaga lain. Misalnya lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, atau universitas. Kerjasama tersebut termasuk dalam mengelola dana CSR maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Universitas.
 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium., perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung lembaga sosial yang
-

didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, polaini lebih memusatkan perhatian pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

5. Implementasi CSR

Implementasi CSR merupakan tahapan pelaksanaan program tanggungjawab perusahaan yang telah direncanakan sebelumnya. Menejemen implementasi pelaksanaan program tanggungjawab sosial erusahaan dapat dilakukan dengan pola *charity, social activity, community development*.³⁹

a) Berbasis *charity*

Berarti dalam implementasi tanggungjawab sosial perusahaan bersifat karikatif, jangka pendek, insidental. Masyarakat sebagai penerima manfaat dijadikan sebagai objek yang menerima batuan dari perusahaan.

b) Bebas *social activity*

Merupakan strategi pelaksanaan tanggungjawab sosial dengan bantuan jasa untuk meringankan atau membantu meringankan masyarakat.

c) Berbasis *community development*

³⁹Nor Hadi, “*Corporate Social Responsibility*”, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hal

Pelaksanaan implementasi tanggungjawab sosial model ini stakeholder dilibatkan dalam paradigma *common interest*. Menggunakan prinsip *sibiosis mutualisme* sebagai pijakan pelaksanaan tanggungjawab sosial. Stakeholder dilibatkan dalam perencanaan pembuatan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan yang dikelola bersama lewat kegiatan produktif seperti *income generation*, dana bergulir, pelatihan kelompok tani dan lain sebagainya. Kepentingan bersama (*common interest*) merupakan konsep yang dikembangkan dari konsep teori kepentingan nasional (*national interest*) karya Morgenthau.

6. Hasil Program CSR

Menurut Siagian dan Nana seperti dikutip oleh Busyra menjelaskan bahwa hasil atau dampak yang dari implementasi CSR bisa dilihat secara komprehensif dikelompokkan menjadi enam bidang, yaitu: bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang legal, bidang etika, dan bidang direksi (kebebasan mengambil keputusan).⁴⁰

Keberhasilan CSR di bidang ekonomi dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik internal maupaun eksternal. Hasilnya semisal penciptaan lapangan kerja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih

⁴⁰Busyra Azheri, "Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory", (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2012) hal 43

mandiri. Dibidang lingkungan bisa membantu terwujudnya desa yang asri dan sejuk.

Dwi Kartini menambahkan ada delapan indikator yang sebaiknya digunakan dalam pengukuran keberhasilan dalam mengimplementasikan program CSR, yaitu:⁴¹

a) *Leadership* (kepemimpinan)

Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari *top management* perusahaan. Hal ini menunjukkan kesadaran filantropi dari pimpinan perusahaan yang menjadi dasar implementasi program-program CSR.

b) Proporsi bantuan

CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areannya luas, maka anggaran yang dikeluarkan harus lebih besar. Jadi tidak menjadi dasar tolak ukur apabila anggaran besar menjadikan program CSR bagus.

c) Transparansi dan Akuntabilitas

Terdapatnya laporan tahunan program CSR dan memiliki mekanisme audit sosial dan finansial. Audit sosial berhubungan dengan pengujian sejauh mana program-program CSR telah dapat ditunjukkan secara benar

⁴¹Dwi Kartini, "Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2009) hal 54-55

sesuai kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan *feed back* dari masyarakat secara benar dengan melakukan wawancara kepada penerima manfaat.

d) Cakupan wilayah

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan oleh perusahaan

e) Perencanaan, mekanisme mentoring dan evaluasi

a. Dalam perencanaan diperlukan adanya jaminan untuk melibatkan *stakeholder* pada setiap pelaksanaan proyek.

b. Terdapat keselarasan untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya-budaya lokal yang ada. Misalnya masyarakat menjadi sadar akan potensi lokal yang bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.

c. Terdapat *blue-print policy* yang menjadi dasar pelaksanaan program.

f) Pelibatan *stakeholder*

a. Terdapat mekanis mekoordinasi regular dengan *stakeholder*, utamanya adalah masyarakat.

b. Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam program CSR.

g) Keberlangsungan (*sustainability*)

a. Terjadinya alih peran dari perusahaan ke masyarakat. misalnya

masyarakat menjadi termotivasi untuk mengembangkan program yang awalnya digagasan oleh perusahaan.

- b. Tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) program dan hasil program pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi menjaga dan memelihara keberlangsungan program dengan baik.
- c. Adanya pilihan *partner* program yang bisa menjamin tanpa keikutsertaan perusahaan dalam implemetasi program di masyarakat, program masih bisa berjalan sampai selesai dengan *partner* tersebut. Rasa memiliki dalam pelaksanann program bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam program yang mereka jalankan.

h) Hasil (*outcome*)

- a. Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan dan membuktikan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (bidang kesehatan), atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya SDM (bidang pendidikan), atau parameter lainnya sesuai dengan bidang CSR sesuai yang dipilih oleh perusahaan. Peningkatan dalam bidang pendidikan dapat ditandai dengan meningkatnya ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat.
- b. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. misalnya masyarakat yang tadinya individual dan tidak memiliki jiwa wirausaha menjadi sadar akan nilai-nilai sosial dan mulai membangun

wirausaha.

- c. Memberikan dampak ekonomis masyarakat yang dinamis dan keberlanjutan.

Terjadinya pengutan-pengutan di masyarakat (*community empowerment*). Misalnya masyarakat yang acuh kepada lingkungan menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁴²

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan kata lain tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

⁴²Aldy Rambe, "*Capital Tunnel Syndrome*", Dikutip Juli 2019 dari <http://www.rsup.adamamlik.cline.net.html>

Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual dapat dihubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup. Kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander⁴³ *“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”* Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga- lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan- kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana seseorang terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat hidup. Terpenuhinya kebutuhan jasmani dapat berupa terpenuhinya sandang pangan dan memiliki rumah yang layak atau dengan kata lain terpenuhinya

⁴³Walter Friedlander, *Introduction to Social Welfare* Edition (New Jersey : Prentice Hall, 1982), hal 219.

kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan rohani dapat berupa terpenuhinya pendidikan yang layak, terpenuhinya hiburan (rekreasi).

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.⁴⁴

Tiga criteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena

⁴⁴Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*(Jakarta: Gema Insani Press, 2000),

2. Indikator Kesejahteraan Ekonomi

Aspek-aspek yang sering dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan social budaya. Tetapi mengapa sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Menurut Kolle yang dikutip oleh Rosni, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti halnya kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti halnya kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti halnya fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Indikator kesejahteraan di atas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa

kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lainnya.⁴⁵

Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. Dalam Surat An-nahl ayat 97, sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt. Dalam Surat Quraisy ayat 3-4. Indikator kesejahteraan menurut islam dalam

Surat Quraisy ayat 3-4 yaitu:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah) (106:3) Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut (106:4)⁴⁶

Dari ayat diatas bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran ada tiga yaitu, menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan manghilangkan rasa takut.

⁴⁵Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Jurnal Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Vol. 9 No. 1, 2017, hal. 57-58

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013), ha102.

1) Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah. mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan Tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang Khalik. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.⁴⁷

2) Menghilangkan lapar

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat tersebut diawali dengan penegasan kembali tentang Tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah, Jadi ditegaskan rizki berasal dari Allah bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan rizki dari Allah. Kemudian ayat diatas juga disebutkan bahwa rizki yang bersumber dari Allah tersebut untuk menghilangkan lapar.⁴⁸

3) Menghilangkan rasa takut

⁴⁷ Muhammad Sobary, *Etika Islam: Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial* (Yogyakarta:LkiS, 2007), ha17.

⁴⁸ M. Hamdar Arriyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan:Telaah Perspektif Al-Quran* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007), hal 11.

Membuat suasana menjadi aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan membuat sistem yang menjaga kesolehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian internal dari proses mensejahterakan masyarakat.⁴⁹

D. Tinjauan Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.⁵⁰ Daya dalam arti kekuatan disini berasal dari dalam, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguat dari luar. Dalam konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul dari gagasan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunia nya sendiri. Sedangkan menurut H.M. Ya’kub yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam bukunya “Metodologi Pemberdayaan Masyarakat” mengungkapkan bahwa :

Pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (*empowering society*). Proses ini mencakup tiga aktivitas penting, yaitu pertama, membebaskan dan menyadarkan masyarakat.kegiatan ini subyektif dan

⁴⁹*Ibid*, hal 12

⁵⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal 188

memihak kepada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan yang ketiga, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.⁵¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya menyadarkan atau mengajak masyarakat untuk hidup mandiri tidak tergantung dengan orang lain, dengan cara memberikan pengetahuan serta ketrampilan yang dapat membuat masyarakat mengambil keputusan secara baik yang berguna untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

2. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam praktek pemberdayaan yang dilakukan banyak pihak, seringkali pemberdayaan difokuskan pada bidang ekonomi untuk pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk

⁵¹Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

meningkatkan pendapatan (*income generating*).⁵²

Menurut Mardikanto (2003) ada empat upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:⁵³

1. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang paling pertama dan utama dalam pemberdayaan masyarakat, sebab manusia merupakan pelaku dan atau pengelola manajemen itu sendiri. hal ini dilandasi bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia.

2. Bina Usaha

Bina manusia dan bina usaha merupakan satu kesatuan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat pada perbaikan kesejahteraan ekonomi tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan.

3. Bina Lingkungan

Isu tentang lingkungan menjadi sangat penting sejak dikembangkannya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dan terlihat pada keawajiban dilakukannya AMDAL (Analisi Manfaat Dampak Lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ecolabel.

⁵²Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 113

⁵³ *ibid.* hal 113

Isu lingkungan selama ini sering sekali dimaknai sekedar lingkungan fisik saja. Padahal isu lingkungan masalah fisik saja, tetapi masalah yang paling utama adalah masalah pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu masih ada lingkungan sosial yang juga tak kalah pentingnya. Kedua isu lingkungan tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu bisnis atau usaha. Atas kesadaran itulah mendorong dikeluarkannya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang didalamnya berisi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dunia internasional mengenal dengan ISO 26000 tahun 2007 tentang tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

4. Bina Kelembagaan

Kata lembaga sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu pranata sosial (*social institution*) dan organisasi sosial (*social organization*). Pada prinsipnya, suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki 4 komponen, yaitu:

- a. Komponen person, dimana setiap orang-orang yang terlibat didalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi
- b. Komponen kepentingan, dimana orang-orang yang memiliki kepentingan tersebut terkait oleh satu kepentingan dan tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- c. Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan

seperangkat kesepakatan yang dipegang bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.

- d. Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankan secara benar sesuai dengan peran yang diemban.

E. Penelitian Terdahulu

Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) menjadi salah satu kebijakan yang strategis dalam upaya pembangunan suatu negara. Keberlangsungan program tanggung jawab perusahaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah banyak menghasilkan penelitian dan kajian teoritis sebagai upaya memberikan gambaran secara nyata mengenai pelaksanaan kebijakan program tanggung jawab perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait tentang tanggung jawab sosial perusahaan antara lain:

Skripsi Iin Purnamasari, *“Implementasi Corporate Social Responsibility Oleh Pabrik Kulit PT. Adi Satria Abadi (ASA) Yogyakarta untuk Masyarakat Sekitar”*⁵⁴ Dalam skripsi ini membahas bagaimana PT. Adi Satria Abadi dalam melaksanakan peranan CSR-nya serta mencoba mengungkap motivasi apa yang menjadi alasan perusahaan melakukan

⁵⁴ Iin Purnamasari, *Implementasi Corporate Social Responsibility Pabrik Kulit PT Adi Satria Abadi (ASA) Yogyakarta Untuk Masyarakat Sekitar*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

program tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan PT ASA tidak membawakan dampak yang cukup berarti bagi masyarakat sekitar, karena kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat insidental, yaitu kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan hanya pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak bersifat pemberdayaan masyarakat.

Sela Marlina, "*Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Melalui CSR Bank Indonesia Di Yogyakarta*".⁵⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana Bank Indonesia dalam melakukan program CSR-nya di Yogyakarta yang berupa pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mengambil dua sampel yang mendapatkan manfaat dari program CSR Bank Indonesia. Sampel yang pertama adalah kelompok tani ikan mina kepis, dimana hasil yang di peroleh dari pemberdayaan oleh Bank Indonesia berhasil dengan indikator petani mampu meningkatkan hasil produksi dan pendapatannya. Sedangkan sampel yang kedua adalah petani gula semut dikulonprogo. Menurut peneliti pemberdayaan yang dilakukan Bank Indonesia pada sampel ini belum berhasil karena terkendala dalam proses pemasaran hasil pertanian.

Haji Ari Darisman, "*Implementasi Corporate Social Responsibility*

(CSR) PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo Melalui *One Village One Sister*

⁵⁵ Sela Marlina, *Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Melalui CSR Bank Indonesia di Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Company Di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulonprogo Yogyakarta”.⁵⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan program CSR yang dilakukan oleh bank daerah yaitu Bank Pasar Kulon Progo dalam melakukan kegiatan CSR di Kulon Progo. Dalam menjalankan kegiatan CSR-nya Bank Pasar Kulon Progo mengunaklangkah-langkah yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pemetaan pontensi, perumusan program, implementasi dan evaluasi. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa dampak dari pelaksanaan CSR masih belum merata keseluruh masyarakat desa sidoharjo.

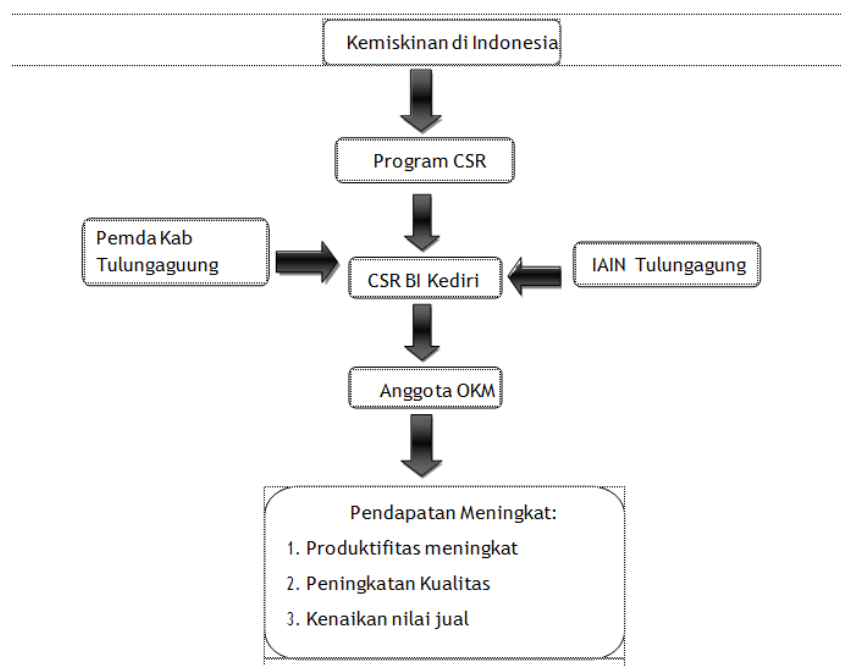
Skripsi Febrina Permata Putri, “Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* dalam mempertahankan citra (Studi Deskriptif-Kualitatif Di PT Angkasa Pura I Adisucipto Yogyakarta Pada Program Kemitraan Dan Binalingkungan).¹⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi CSR dan kaitannya dengan citra perusahaan pada masyarakat.

Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah ada, penelitian mengenai Implementasi Program Sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah D.I Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yogyakarta masih belum ada. Perbedaan antara skripsi yang ditulis dengan beberapa skripsi diatas terletak pada pogram CSR-nya berbeda, implementasi perusahaan, dan lokasi penelitiannya. Dalam

⁵⁶ Haji Ari Darisman, “*Implementasi Corporate Sicoal Responsibility (CSR) PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo Melalui One Village One Sister Company Di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulonprogo Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakrta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

penelitian ini pembahasan yang diutamakan adalah Implementasi Program Sosial Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah D.I Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta. Pada program pengembangan ekonomi kelompok tani cabai di Kulonprogo dan kelompok tani kakao di Desa Ngelanggeran Gunung Kidul.

F. Kerangka Berfikir



Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

Angka kemiskinan di Negara Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut Bank Dunia, dalam beberapa bulan terakhir ini angka kemiskinan tersebut telah mencapai 49%. Berbagai program telah dilaksanakan dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 yang

menyatakan bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan CSR. Salah satunya yaitu CSR dari Bank Indonesia Kediri. CSR Bank Indonesia Kediri bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2017-2020, Bank Indonesia Kediri mengimplementasikan CSR di Omah Kopi Mandiri. Dalam hal ini, Bank Indonesia Kediri bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Tulungagung serta Institute Agama Islam Negeri Tulungagung. Bank Indonesia Kediri berperan sebagai fasilitator kemudian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Tulungagung serta Institute Agama Islam Negeri Tulungagung berperan sebagai pendamping teknis.

Program CSR yang diimplementasikan di Omah Kopi Mandiri antara lain bantuan pembangunan fisik, pendampingan teknis, pelatihan, dan kunjungan usaha. Program tersebut diimplementasikan untuk meningkatkan produktifitas, peningkatan kualitas hingga pendapatan.